

**Tabel Keluaran Setiap Jenjang Jabatan Ditjen Aplikasi Informatika (Revisi Mercure\_15 Feb 2018)**

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
<b>Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika</b>	Terselenggaranya tata kelola aplikasi informatika yang akuntabel, transparan, dan efisien	Subdit. Tata Kelola Sistem Elektronik & Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjabarkan UU ITE dan PP 82 PSTE terkait Sistem Elektronik &amp; Ekonomi Digital</li> <li>➤ Mengidentifikasi dan menelaah kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan terkait sistem elektronik dan ekonomi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan.</li> <li>➤ Kebijakan Turunan Perpres Peta Jalan Ecommerce</li> <li>➤ Penyusunan Regulasi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft Penyusunan Materi RUU TCI bagian dari KUHAP,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg perubahan atas PP PSTE,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Tata kelola sistem Elektronik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Kompetensi tenaga ahli</li> <li>- Kebijakan/Regulasi tata cara dan persyaratan pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Sertifikat kelaikan sistem Elektronik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi lembaga sertifikat keandalan.</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg integrasi layanan pendaftaran PSE,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi kredit usaha rakyat di bidang aplikasi informatika,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg Audit PSE pada penyelenggaraan Pelayanan Publik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Persyaratan teknis perangkat keras sistem elektronik.</li> <li>- Kebijakan/Regulasi perangkat lunak sistem elektronik.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Layanan terintegrasi aplikasi informatika:</b></li> <li>➤ <b>Tata kelola Pusat informasi jaringan internet/ID NIC</b></li> <li>➤ <b>Tata kelola nama domain indonesia</b></li> </ul>	Seksi Perencanaan Tata Kelola Sistem Elektronik & Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tata kelola Pusat informasi jaringan internet/ID NIC</b></li> <li>- Penyusunan Regulasi:</li> <li>- Draft Penyusunan Materi TCI bagian dari KUHAP,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg perubahan atas PP PSTE,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Tata kelola sistem Elektronik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Kompetensi tenaga ahli</li> <li>- Kebijakan/Regulasi tata cara dan persyaratan pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Sertifikat kelaikan sistem Elektronik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi lembaga sertifikat keandalan.</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg integrasi layanan pendaftaran PSE,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi kredit usaha rakyat di bidang aplikasi informatika,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg Audit PSE pada penyelenggaraan Pelayanan Publik,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi Persyaratan teknis perangkat keras sistem elektronik.</li> <li>- Kebijakan/Regulasi perangkat lunak sistem elektronik.</li> </ul>
				Seksi Penerapan Tata Kelola Sistem Elektronik & Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Tata kelola nama domain indonesia</b></li> <li>➤ <b>Tata kelola intensifikasi PNBP bidang Aptika</b></li> <li>➤ <b>Layanan terintegrasi aplikasi informatika:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan/pendaftaran domain.go.id,</li> <li>• Permohonan siMAYA dan PNSmail,</li> <li>• Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik (PSE),</li> <li>• Permohonan Pusat Penitipan data (PUSPITA),</li> <li>• Permohonan layanan sistem whitelist nusantara,</li> <li>• Pendaftaran klasifikasi permainan interaktif elektronik,</li> </ul> </li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			➤ Tata kelola intensifikasi PNBP bidang Aptika		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan hasil audit penyelenggaraan sistem elektronik (PSE),</li> <li>• Pelayanan pengaduan kasus tindak pidana ITE,</li> <li>• Pengaduan konten internet bermuatan negatif (Trust+)</li> <li>• Pendaftaran sistem manajemen pengamanan informasi (SMPI),</li> <li>• Pelayanan Permohonan Sertifikasi kelaikan Sistem</li> </ul>
		Subdirektorat Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjabarkan UU ITE dan PP 82 PSTE sesuai Perlindungan Data Pribadi.</li> <li>- Mengidentifikasi dan menelaah kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan terkait Perlindungan Data Pribadi sesuai kebutuhan dan perkembangan.</li> <li>- Penyusunan Regulasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Perlindungan data Pribadi,</li> <li>• PP ttg tandatangan digital intansi penyelenggaraa negara,</li> <li>• Kebijakan/Regulasi perubahan ttg penanganan situs bermuatan negatif,</li> <li>• Kebijakan/Regulasi pengiriman informasi yang bersifat mengganggu/SPAM,</li> <li>• Kebijakan/Regulasi ttg Kaminfo untuk sektor Strategis,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Perencanaan Tata Kelola Data Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjabarkan UU ITE dan PP 82 PSTE sesuai Perlindungan Data Pribadi.</li> <li>- Mengidentifikasi dan menelaah kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan terkait Perlindungan Data Pribadi sesuai kebutuhan dan perkembangan.</li> </ul>
		Subdirektorat Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjabarkan UU ITE dan PP 82 PSTE terkait Perlindungan Infrastruktur Informasi Digital</li> <li>- Mengidentifikasi dan menelaah kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan terkait perlindungan infrastruktur informasi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan.</li> <li>- Menyusun regulasi bidang e-Government/ asitektur nasional bidang TIK (roadmap e-comenrce roadmap e-gov, blueprint e-gov),</li> <li>- Kebijakan/Regulasi pusat koordinasi penanganan insiden bidang TIK.</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg standar keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Perencanaan Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun regulasi bidang e-government/ asitektur nasional bidang TIK (roadmap e-comenrce roadmap e-gov, blueprint e-gov),</li> <li>• Menjabarkan UU ITE dan PP 82 PSTE terkait Perlindungan Infrastruktur Informasi Digital</li> <li>• Mengidentifikasi dan menelaah kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan terkait perlindungan infrastruktur informasi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan.</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Penerapan Tata Kelola Sistem Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan/Regulasi pusat koordinasi penanganan insiden bidang TIK.</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			<p>informasi untuk sektor strategis,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan/Regulasi penyelenggaraan pusat data dan jaringan intra pemerintah,</li> <li>- lampiran RPM untuk standar teknis kompetensi perangkat daerah bidang aptika,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg perlindungan informasi infrastruktur kritikal,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi strategi keamanan siber nasional</li> <li>- Kebijakan/Regulasi penyelenggaraan pusat data pada instansi penyelenggaraa negara,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi tentang interoperabilitas sistem elektronik instansi penyelenggaraan negara,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi tentang penyelenggaraan portal dan situs web badan pemerintahan,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi sistem elektronik perkantoran badan Pemerintahan (e-Office),</li> </ul>	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg standar keamanan informasi untuk sektor strategis,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi penyelenggaraan pusat data dan jaringan intra pemerintah,</li> <li>- lampiran RPM untuk standar teknis kompetensi perangkat daerah bidang aptika,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg perlindungan informasi infrastruktur kritikal,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi strategi keamanan siber nasional</li> <li>- Kebijakan/Regulasi penyelenggaraan pusat data pada instansi penyelenggaraa negara,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi tentang interoperabilitas sistem elektronik instansi penyelenggaraan negara,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi tentang penyelenggaraan portal dan situs web badan pemerintahan,</li> <li>- Kebijakan/Regulasi sistem elektronik perkantoran badan Pemerintahan (e-Office),</li> </ul>
		Subdirektorat Tata Kelola Sertifikat Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penyusunan regulasi pembinaan jabatan fungsional master e-government dan manggala informatika</b></li> <li>- Menjabarkan UU ITE dan PP 82 PSTE terkait Sertifikat Elektronik</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg penyelenggaraan sertifikat elektronik (PSre),</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg tata cata memiliki sertifikat elektronik,</li> <li>- Penciptaan industri sertifikat digital nasional</li> <li>- Bertugas membuat kebijakan implementasi sertifikat digital pada layanan pemerintah dan non pemerintah,</li> <li>- Kebijakan membangun registration authority (RA) nasional di sektor,</li> <li>- Strategi implementasi Sertifikat Digital pada layanan pemerintah dan non pemerintah,</li> <li>- Menyusun kebijakan, standar dan panduan teknis CA,</li> <li>- Membantu sektor menyusun regulasi (payung hukum) implemetasi di masing-masing sektor.</li> <li>- Bertanggungjawab membangun PNBPN agar</li> </ul>	Seksi Perencanaan Tata Kelola Sertifikasi Elektronik  Seksi Penerapan Tata Kelola Sertifikat Elektronik	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjabaran UU ITE dan PP 82 PSTE terkait Sertifikat Elektronik</li> <li>- Penciptaan industry sertifikat digital nasional</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg penyelenggaraan sertifikat elektronik (PSre),</li> <li>- Kebijakan/Regulasi ttg tata cata memiliki sertifikat elektronik,</li> </ul> Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan membangun registration authority (RA) nasional di sektor,</li> <li>- Strategi implementasi Sertifikat Digital pada layanan pemerintah dan non pemerintah,</li> <li>- Menyusun kebijakan, standar dan panduain teknis CA,</li> <li>- Membantu sektor menyusun regulasi (payung hukum) implemetasi di masing-masing sektor.</li> <li>- Bertanggungjawab membangun PNBPN agar pembiayaan implementasi sertifikat digital dapat dibiayai tanpa menggunakan anggaran</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>pembiayaan implementasi sertifikat digital dapat dibiayai tanpa menggunakan anggaran APBN.</li> <li>Penyusunan kebijakan sertifikasi kelaikan sistem elektronik</li> </ul>		APBN. <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan regulasi pembinaan jabatan fungsional master e-government dan manggala informatika</li> </ul>
<b>Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan</b>	Terwujudnya tata kelola dan pelaksanaan aplikasi informatika pemerintahan di Indonesia yang mampu menciptakan birokrasi yang transparan dan efisien	Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan data Center meliputi layanan hosting, VPS, maintenance perangkat pendukung</li> <li>Layanan jaringan intra pemerintah (Instalasi PNS BOX + IP Sistem elektronik pemerintah)</li> <li>Layanan pertukaran data dan integrasi aplikasi informatika (GSB-Mantra)</li> <li>interoperabilitas metadata di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;</li> <li>Mengolah hasil Big Data Analysis bagi kepentingan Pemerintah</li> </ul>	Seksi Teknologi & Infrastruktur Aplikasi Informatika Pemerintahan	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan data Center meliputi layanan hosting, VPS, maintenance perangkat pendukung</li> <li>Layanan jaringan intra pemerintah (Instalasi PNS BOX + IP Sistem elektronik pemerintah)</li> <li>Hasil Big Data Analysis bagi kepentingan Pemerintah</li> </ul>
				Seksi Interoperabilitas & Intekonektivitas Aplikasi Informatika Pemerintahan	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan pertukaran data dan integrasi aplikasi informatika (GSB-Mantra)</li> <li>interoperabilitas metadata di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;</li> </ul>
				Seksi Pengembangan Aplikasi Layanan Kepemerintahan daerah	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan nama domain pemerintah dan desa (Implementasi PP 12 Thn 2017 ttg pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah khusus bidang tata kelola e-government)</li> <li>Pelaksanaan standar penerapan teknologi e-government dengan software legal berbasis free open source software</li> </ul>
		Subdirektorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan nama domain pemerintah dan desa (Implementasi PP 12 Thn 2017 ttg pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah khusus bidang tata kelola e-government)</li> <li>Layanan Smartcity</li> <li>Pelaksanaan assessment Penyelenggaraan e-Government</li> <li>Pelaksanaan standar penerapan teknologi e-government dengan software legal berbasis free open source software</li> <li>Implementasi interoperabilitas/interkonektivitas lintas sektor mulai pada tahap koordinasi/kerjasama terkait kebutuhan sharing, ketersediaan (wali data), konsistensi data, pemetaan data)</li> </ul>	Seksi data dan informasi layanan aplikasi informatika PEMDA	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Smartcity</li> <li>Pelaksanaan assessment Penyelenggaraan e-Government</li> <li>Implementasi interoperabilitas/interkonektivitas lintas sektor mulai pada tahap koordinasi/kerjasama terkait kebutuhan sharing data, ketersediaan Data(wali data), konsistensi data, pemetaan data)</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
		Subdirektorat Layanan Aplikasi Informatika POLHUKAM (10) <i>Kemendagri Kemlu Kemhan Kumham Kominfo KemenPan RB Kejagung TNI Polri</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan standar penerapan teknologi e-government dengan software legal berbasis free open source software</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan layanan roadmap e-government per sektor : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirasi dan pengaduan terpadu</li> <li>• Sistem informasi administrasi kependudukan</li> <li>• Sistem informasi peradilan</li> <li>• Standarisasi seluruh portal K/L</li> <li>• Layanan e-office</li> <li>• Standarisasi informasi back office</li> <li>• Integrasi dasar pada seluruh K/L</li> <li>• PNS data Managemen</li> <li>• Nasional Presiden Priority dashboard</li> <li>• Nasional big data</li> <li>• E-voting</li> <li>• Nasional single portal</li> </ul> </li> </ul> <p>Implementasi interoperabilitas/interkoneksi lintas sektor mulai pada tahap koordinasi/kerjasama terkait kebutuhan sharing data, ketersediaan data(wali data), konsistensi data, pemetaan data dan penyusunan regulasi &amp; standar)</p>	<p>Seksi Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika POLHUKAM</p> <p>Seksi Data dan Informasi Layanan Aplikasi Informatika POLHUKAM</p>	<p>Terlaksananya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan standar penerapan teknologi e-government dengan software legal berbasis free open source software,</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan layanan roadmap e-government per sector</li> </ul> <p>Terlaksananya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi interoperabilitas/interkoneksi lintas sektor mulai pada tahap koordinasi/kerjasama terkait kebutuhan sharing data, ketersediaan data (wali data), konsistensi data, pemetaan data dan penyusunan regulasi &amp; standar)</li> </ul>
		Subdirektorat Layanan Aplikasi Informatika PEREKONOMIAN (10) <i>Kemenkeu Kemenakertrans KemenPerin KemenDag KemenPUPR KemenTan KemenLingkunganhidup dan Kehutanan Kemen Agraria dan Tata Ruang Kemen BUMN Kemen Koperasi dan UKM</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya standar penerapan teknologi e-government dan free open source software</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan layanan roadmap e-government per sektor : <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-payment bantuan tunai nasional</li> <li>• Integrasi dan pelaporan ekspor impor</li> <li>• e-budgting nasional</li> <li>• Perizinan online terintegrasi</li> <li>• Nasional Single Window</li> </ul> </li> </ul> <p>Implementasi interoperabilitas/interkoneksi lintas sektor mulai pada tahap koordinasi/kerjasama terkait kebutuhan sharing data, ketersediaan data(wali data), konsistensi data, pemetaan data dan penyusunan regulasi &amp;</p>	<p>Seksi Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian</p> <p>Seksi data dan informasi Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian</p>	<p>Terlaksananya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya standar penerapan teknologi e-government dan free open source software</li> </ul> <p>Peningkatan kapasitas dan layanan roadmap e-government per sektor</p> <p>Terlaksananya:</p> <p>Implementasi interoperabilitas/interkoneksi lintas sektor mulai pada tahap koordinasi/kerjasama terkait kebutuhan sharing data, ketersediaan data(wali data), konsistensi data, pemetaan data dan penyusunan regulasi &amp; standar)</p>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			standar)		
		Subdirektorat Layanan Aplikasi Informatika Kemaritiman dan PMK (14) <i>KemenESDM KemenHub Kemen Kelautan dan Perikanan Kemen Pariwisata Kemen Agama Kemendikbud Ristek Dikti KemenKes Kemen Sosial Kemen Desa PDTT Kemen PPPA Kemenpora</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya standar penerapan teknologi e-government dan free and open source software</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan layanan roadmap e-government per sektor : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi penunjang sektor pertanian dan perikanan</li> <li>• Pembinaan Sistem Elektronik Destruktive di bidang Transportasi</li> <li>• Pangkalan Data Pendidikan nasional (Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemenag)</li> <li>• Platform Integrasi Data Pengentasan kemiskinan</li> <li>• Model Aplikasi Event Olahraga (Nasional dan Internasional)</li> <li>• Tata kelola IT Perhotelan dan Arena Pariwisata lainnya</li> </ul> </li> </ul>	Seksi Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika Kemaritiman & PMK	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar penerapan teknologi e-government dan free and open source software</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan layanan roadmap e-government per sektor :</li> </ul>
				Seksi data dan informasi Layanan Aplikasi Informatika Kemaritiman & PMK	Terlaksananya: Implementasi interoperabilitas/interkoneksi lintas sektor mulai pada tahap koordinasi/kerjasama terkait kebutuhan sharing data, ketersediaan data (wali data), konsistensi data, pemetaan data dan penyusunan regulasi & standar)
<b>Direktorat Pemberdayaan Informatika</b>	Terselenggaranya pemberdayaan informatika yang mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui penggunaan dan pemanfaatan aplikasi dan konten informatika secara bijak dan bertanggung jawab	Subdirektorat Literasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Literasi Digital Indonesia</li> <li>- Perancangan Model Literasi Digital</li> <li>- Menyusun Strategi Literasi Digital</li> <li>- Pembuatan Materi dan Bahan Literasi Digital</li> <li>- Evaluasi Literasi Digital</li> <li>- Bimtek dan sosialisasi Internet cerdas, kreatif dan produktif (Intenet CAKAP),</li> <li>- Sosialisasi UU ITE dan PPSTE,</li> <li>- Awarness Pemanfaatan TIK yang aman bagi masyarakat</li> <li>- Edukasi perlindungan data pribadi didalam sistem elektronik</li> <li>- Awarness e-commerce</li> <li>- Fasilitasi dan sosialisasi Child Online Protection</li> <li>- Fasilitasi Festival Literasi Digital</li> <li>- Evaluasi Literasi Digital</li> </ul>	Seksi Perancangan Literasi Digital	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Literasi Digital Indonesia</li> <li>- Perancangan Model Literasi Digital</li> <li>- Menyusun Strategi Literasi Digital</li> <li>- Pembuatan Materi dan Bahan Literasi Digital</li> <li>- Evaluasi Literasi Digital</li> </ul>
				Seksi Penerapan Literasi Digital	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Awarness Pemanfaatan TIK yang aman bagi masyarakat</li> <li>- Awarness e-commerce</li> <li>- Fasilitasi dan sosialisasi Child Online Protection</li> <li>- Edukasi perlindungan data pribadi didalam sistem elektronik</li> <li>- Bimtek dan sosialisasi Internet cerdas, kreatif dan produktif (Intenet CAKAP),</li> <li>- Sosialisasi UU ITE dan PPSTE</li> <li>- Fasilitasi Festival Literasi Digital</li> </ul>
		Subdirektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Komunitas TIK</li> <li>- Perancangan Model Pemberdayaan Komunitas</li> </ul>	Seksi Perancangan Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Pemetaan Komunitas TIK</li> <li>- Perancangan Model Pemberdayaan</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
		Pemberdayaan Komunitas TIK	TIK - Penguatan dan Pembinaan Komunitas TIK - Fasilitasi Pemberdayaan Komunitas TIK - Fasilitasi Temu Komunitas TIK Daerah dan Nasional - Fasilitasi <i>Showcase</i> Komunitas TIK - Evaluasi Pemberdayaan Komunitas TIK	Komunitas TIK	Komunitas TIK - Evaluasi Pemberdayaan Komunitas TIK
				Seksi Penerapan Pemberdayaan Komunitas TIK	- Penguatan dan Pembinaan Komunitas TIK - Fasilitasi Pemberdayaan Komunitas TIK (Relawan Goes To School, Komunitas Kebaya-Kopi-Buku, Jagongan Media Rakyat, Jalin Merapi dll) - Fasilitasi Temu Komunitas TIK Daerah dan Nasional (Festival TIK, Festival Desa TIK, dll) - Fasilitasi <i>Showcase</i> Komunitas TIK
		Subdirektorat Pemberdayaan Kapasitas TIK	- Pembentukan Teknopreneur melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ignition,</li> <li>• Workshop,</li> <li>• Hacksprint,</li> <li>• Bootcamp, dan</li> <li>• incubation.</li> </ul> - Mempertemukan antara <i>demand</i> dan <i>supply</i> - Menyusun <i>business model</i> terbaik - Merancang model pembinaan developer aplikasi, developer perangkat Internet of Things (IoT), dan coding pada pelajar - Pembinaan kepada developer perangkat Internet of Things (IoT) - Pembinaan kepada pelajar terkait Coding - Identifikasi dan Pemetaan Developer aplikasi, developer perangkat IoT - Evaluasi Pemberdayaan Kapasitas TIK	Seksi Perancangan Pemberdayaan Kapasitas TIK	- Menyusun <i>business model</i> terbaik - Identifikasi dan Pemetaan Developer aplikasi, developer perangkat IoT - Merancang model pembinaan developer aplikasi, developer perangkat Internet of Things (IoT), dan coding pada pelajar - Evaluasi Pemberdayaan Kapasitas TIK
				Seksi Penerapan Pemberdayaan Kapasitas TIK	- Pembinaan kepada developer aplikasi melalui tahapan Ignition, Workshop, Hacksprint, Bootcamp, dan incubation. - Pembinaan kepada developer perangkat Internet of Things (IoT) - Pembinaan kepada pelajar terkait Coding - Mempertemukan antara <i>demand</i> dan <i>supply</i>
				Seksi Perancangan Pemberdayaan Kreatifitas TIK	- Perancangan Model Pemberdayaan Kreatifitas TIK - Identifikasi dan Pemetaan Produk Kreatifitas TIK - Studi Produk Kreatifitas TIK Nasional dan Internasional - Fasilitasi developer dan creator ke dunia internasional (ASEAN ICT Award, Asia-Pacific ICT Award) - Fasilitasi Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia - Sosialisasi dan Fasilitasi Siberkreasi - Fasilitasi Ajang Kreatifitas (IdeaFest, HelloFest, dll) - Penyelenggaraan Pelatihan Kreatifitas di
		Subdirektorat Pemberdayaan Kreatifitas TIK		Seksi Perancangan Pemberdayaan Kreatifitas TIK	- Perancangan Model Pemberdayaan Kreatifitas TIK - Identifikasi dan Pemetaan Produk Kreatifitas TIK - Studi Produk Kreatifitas TIK Nasional dan Internasional - Evaluasi Pemberdayaan Kreatifitas TIK
				Seksi Penerapan Pemberdayaan Kreatifitas TIK	- Fasilitasi developer dan creator ke dunia internasional (ASEAN ICT Award, Asia-Pacific ICT Award) - Fasilitasi Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia - Sosialisasi dan Fasilitasi Siberkreasi - Fasilitasi Ajang Kreatifitas (IdeaFest, HelloFest, dll)

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			bidang TIK - Fasilitasi <i>Showcase</i> Kreatifitas TIK - Evaluasi Pemberdayaan Kreatifitas TIK		- Penyelenggaraan Pelatihan Kreatifitas di bidang TIK - Fasilitasi <i>Showcase</i> Kreatifitas TIK
<b>Direktorat Ekonomi Digital</b>	Terciptanya struktur dan lingkungan ekonomi digital kondusif dan kompetitif yang mampu menopang perekonomian nasional	Subdirektorat Pengembangan Ekonomi Digital Pendidikan dan Kesehatan	- Menyusun dan melaksanakan strategi pendidikan dan Kesehatan - Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku pendidikan dan kesehatan - Melaksanakan Fasilitasi: Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor pendidikan dan kesehatan - Fasilitasi Strategi Pendidikan Digital - Fasilitasi Distribusi Konten Pendidikan Digital - Fasilitasi pelatihan guru digital - Fasilitasi Identitas nasional dan Nilai - Fasilitasi Forum Guru Digital - Fasilitasi Pengumpulan Data Kesehatan secara Mobile - Fasilitasi Konektivitas bagi Puskesmas Offline - Fasilitasi Peningkatan partisipasi dari BPJS	Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Pendidikan	- Menyusun dan melaksanakan strategi pendidikan - Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku pendidikan - Melaksanakan Fasilitasi: Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor pendidikan untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor pendidikan - Fasilitasi Strategi Pendidikan Digital - Fasilitasi Distribusi Konten Pendidikan Digital - Fasilitasi pelatihan guru digital - Fasilitasi Identitas nasional dan Nilai - Fasilitasi Forum Guru Digital
				Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Kesehatan	- Menyusun dan melaksanakan strategi Kesehatan - Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku kesehatan - Melaksanakan Fasilitasi: Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor dan kesehatan untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor kesehatan - Fasilitasi Pengumpulan Data Kesehatan secara Mobile - Fasilitasi Konektivitas bagi Puskesmas Offline - Fasilitasi Peningkatan partisipasi dari BPJS
		Subdirektorat Pengembangan Ekonomi Digital Pertanian dan Perikanan	- Menyusun dan melaksanakan strategi petani dan nelayan go-Online - Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi petani dan nelayan, - Fasilitasi Aplikasi bagi petani dan nelayan Online, yakni, Pelaksanaan Fasilitasi: aplikasi penyuluhan market place	Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Pertanian	- Menyusun dan melaksanakan strategi petani go-Online - Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi petani, - Fasilitasi Aplikasi bagi petani Online, yakni, Pelaksanaan Fasilitasi: aplikasi penyuluhan market place



ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi, pendampingan dan permodalan petani dan nelayan untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor Pertanian dan Perikanan</li> <li>- Fasilitasi Pertanian Presisi</li> <li>- Fasilitasi Hub Pertanian Digital</li> <li>- Fasilitasi Peningkatan Keuangan Mikro Pertanian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi, pendampingan dan permodalan petani untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor Pertanian</li> <li>- Fasilitasi Pertanian Presisi</li> <li>- Fasilitasi Hub Pertanian Digital</li> <li>- Fasilitasi Peningkatan Keuangan Mikro Pertanian</li> </ul>
				Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan melaksanakan strategi nelayan go-Online</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi nelayan,</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi bagi nelayan Online, yakni, Pelaksanaan Fasilitasi: aplikasi penyuluhan market place</li> <li>- Sosialisasi, pendampingan dan permodalan nelayan untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor Perikanan</li> </ul>
		Subdirektorat Pengembangan Ekonomi Digital Pariwisata, Transportasi dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan melaksanakan strategi Pariwisata, transportasi &amp; perdagangan,</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku Pariwisata, transportasi &amp; perdagangan,</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Marketplace Pariwisata, transportasi &amp; perdagangan Online, yakni: Pelaksanaan Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor pariwisata, transportasi dan perdagangan untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor Pariwisata, transportasi &amp; perdagangan</li> <li>- Fasilitasi Lelang Terbalik</li> <li>- Fasilitasi Perluasan system inaportnet</li> <li>- Mengumpulkan data lalu lintas secara <i>mobile</i></li> <li>- Fasilitasi ketersediaan kartu sim di titik kedatangan</li> <li>- Fasilitasi kartu sim dengan informasi <i>real time</i></li> <li>- Manajemen aplikasi pencarian pengalaman</li> </ul>	Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Pariwisata dan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan melaksanakan strategi pariwisata dan transportasi</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku pariwisata dan transportasi</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Marketplace pariwisata dan transportasi Online, yakni: Pelaksanaan Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor pariwisata dan transportasi untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor pariwisata dan sektor transportasi.</li> <li>- Fasilitasi Lelang Terbalik</li> <li>- Fasilitasi Perluasan system inaportnet</li> <li>- Mengumpulkan data lalu lintas secara <i>mobile</i></li> <li>- Fasilitasi ketersediaan kartu sim di titik kedatangan</li> <li>- Fasilitasi kartu sim dengan informasi <i>real time</i></li> <li>- Manajemen aplikasi pencarian pengalaman</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
				Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan melaksanakan strategi UMKM &amp; perdagangan ,</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku perdagangan,</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Marketplace, perdagangan Online, yakni: Pelaksanaan Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor perdagangan untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor Perdagangan</li> </ul>
		Subdirektorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun dan melaksanakan strategi sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll)</li> <li>➤ Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll)</li> <li>➤ Menyusun dan melaksanakan strategi ekosistem ekonomi digital nasional (KBLI, DNI) dan Internasional (RCEP, CEPA, AFAS, WTDC, dll)</li> <li>➤ Pengembangan model system pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce</li> <li>➤ Mengidentifikasi dan menelaah <i>player</i> dan aplikasi yang melakukan transaksi elektronik di internet.</li> <li>➤ Sosialisasi dan penerapan batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan pedagang (merchant) e-commerce dan perlindungan konsumen</li> <li>➤ Fasilitasi Aplikasi Marketplace Online sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll) yakni: Pelaksanaan Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll) untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika sektor strategis lainnya (Keuangan, ESDM, dll)</li> <li>➤ Pengembangan model system pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce</li> <li>➤ Peningkatan solusi dari Fintech</li> </ul>	Seksi Pengembangan Ekosistem Platform Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan melaksanakan strategi sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll)</li> <li>- Menyusun dan melaksanakan strategi ekosistem ekonomi digital nasional (KBLI, DNI) dan Internasional (RCEP, CEPA, AFAS, WTDC, dll)</li> <li>- Pengembangan model system pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce</li> <li>- Peningkatan solusi dari Fintech</li> <li>- Peningkatan keuangan <i>mobile</i></li> </ul>
				Seksi Fasilitasi Ekosistem Platform Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi dan menelaah <i>player</i> dan aplikasi yang melakukan transaksi elektronik di internet.</li> <li>- Sosialisasi dan penerapan batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan pedagang (merchant) e-commerce dan perlindungan konsumen</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi pelaku sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll)</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Marketplace Online sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll) yakni: Pelaksanaan Sosialisasi, pendampingan dan permodalan bagi pelaku industri sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll) untuk mendapatkan akses kepada aplikasi TIK dan literasi TIK yang memadai agar dapat memanfaatkan aplikasi dari pelaku industri informatika</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan keuangan <i>mobile</i></li> <li>➤ Fasilitasi E-KYC ujung ke ujung</li> <li>➤ Fasilitasi Dashboard inklusi keuangan pemerintah</li> <li>➤ Fasilitasi Platform pencarian fasilitasi kreatif</li> <li>➤ Fasilitasi Sistem IP digital</li> </ul>		sektor strategis nasional lainnya (Keuangan, ESDM, dll) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi E-KYC ujung ke ujung</li> <li>- Fasilitasi Dashboard inklusi keuangan pemerintah</li> <li>- Fasilitasi Platform pencarian fasilitasi kreatif</li> <li>- Fasilitasi Sistem IP digital</li> </ul>
<b>Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika</b>	Terwujudnya lingkungan aplikasi informatika nasional yang kondusif, sehat, dan bertanggung jawab sehingga mampu menunjang pembangunan nasional	Subdirektorat Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital dan Perlindungan Data Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Turunan Perpres Peta Jalan Ecommerce</li> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Turunan PP PSTE</li> <li>- Pengawasan Tata Kelola Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Pengawasan perangkat lunak Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Pengawasan perangkat keras Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Pengawasan Kompetensi Tenaga Ahli pada Penyelenggara Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Melakukan pengawasan Komponen PSE (Audit Penyelenggara SE, SMPI),</li> <li>- Pengawasan penyelenggaraan agen elektronik,</li> <li>- Terlaksananya Sertifikasi kelaikan dan sertifikasi keandalan,</li> <li>- Pengendalian infrastruktur dan teknologi aplikasi informatika (data center, OTT)</li> <li>- Pengujian aplikasi misalnya OWASP/open web application security, project, IOT)</li> <li>- Pengawasan Audit PSE pada penyelenggaraan Pelayanan Publik,</li> <li>- Pengawasan Penerapan arsitektur nasional bidang TIK</li> <li>- Terlaksananya roadmap e-commerce roadmap e-gov, blueprint e-gov,</li> <li>- Pengawasan Kerangka Kerja Perlindungan Infrastruktur Informasi Digital</li> <li>- Terlaksananya Strategi Keamanan siber nasional</li> <li>- Pengendalian</li> <li>- Pengawasan Penanganan Insiden dan Tanggap darurat bidang TIK.</li> </ul>	Seksi Pengendalian Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Turunan Perpres Peta Jalan Ecommerce</li> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Turunan PP PSTE</li> <li>- Pengawasan Tata Kelola Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Pengawasan perangkat lunak Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Pengawasan perangkat keras Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Pengawasan Kompetensi Tenaga Ahli pada Penyelenggara Sistem Elektronik pelayanan publik</li> <li>- Melakukan pengawasan Komponen PSE (Audit Penyelenggara SE, SMPI),</li> <li>- Pengawasan penyelenggaraan agen elektronik,</li> <li>- Terlaksananya Sertifikasi kelaikan dan sertifikasi keandalan,</li> <li>- Pengendalian infrastruktur dan teknologi aplikasi informatika (data center, OTT)</li> <li>- Pengujian aplikasi misalnya OWASP/open web application security, project, IOT)</li> <li>- Pengawasan Audit PSE pada penyelenggaraan Pelayanan Publik,</li> <li>- Pengawasan Penerapan arsitektur nasional bidang TIK</li> <li>- Terlaksananya roadmap e-commerce roadmap e-gov, blueprint e-gov,</li> <li>- Pengawasan Kerangka Kerja Perlindungan Infrastruktur Informasi Digital</li> <li>- Terlaksananya Strategi Keamanan siber nasional</li> <li>- Pengendalian</li> <li>- Pengawasan Penanganan Insiden dan</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Penerapan standar dan panduan keamanan informasi untuk sektor strategis,</li> <li>- Pengawasan penyelenggaraan pusat data dan jaringan intra pemerintah,</li> <li>- Pengawasan Manajemen Risiko sektor strategis</li> <li>- Terlaksananya Pengembangan Kapasitas penerapan sumberdaya sektor strategis</li> <li>- Pengawasan Penanganan Insiden dan tanggap darurat Bidang TIK</li> <li>- interoperabilitas sistem elektronik instansi penyelenggaraan negara,</li> <li>- Terlaksananya Publik Private Partnership sector strategis</li> <li>- Kerjasama nasional dan internasional Perlindungan Infrastruktur Informasi Digital</li> <li>- Terlaksananya Pusat analisis berbagi Informasi 8 Sektor Strategis</li> </ul> <p>Terlaksananya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menerima pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi oleh PSE,</li> <li>➢ koordinasi dengan pimpinan instansi dan pengatur sektor terkait pengaduan sengketa data pribadi,</li> <li>➢ menyelesaikan sengketa data pribadi,</li> <li>➢ membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi,</li> <li>➢ Meminta data &amp; Informasi secara berkala atau sewaktu-waktu dari PSE dalam rangka perlindungan data pribadi,</li> <li>➢ melakukan edukasi kepada masyarakat (pendidikan, pelatihan, advokasi, bimtek, sosialisasi),</li> <li>➢ memberdayakan partisipasi masyarakat dalam edukasi perlindungan data pribadi</li> </ul>		<p>Tanggap darurat bidang TIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Penerapan standar dan panduan keamanan informasi untuk sektor strategis,</li> <li>- Pengawasan penyelenggaraan pusat data dan jaringan intra pemerintah,</li> <li>- Pengawasan Manajemen Risiko sektor strategis</li> <li>- Terlaksananya Pengembangan Kapasitas penerapan sumberdaya sektor strategis</li> <li>- Pengawasan Penanganan Insiden dan tanggap darurat Bidang TIK</li> <li>- interoperabilitas sistem elektronik instansi penyelenggaraan negara,</li> <li>- Terlaksananya Publik Private Partnership sector strategis</li> <li>- Kerjasama nasional dan internasional Perlindungan Infrastruktur Informasi Digital</li> <li>- Terlaksananya Pusat analisis berbagi Informasi 8 Sektor Strategis</li> </ul>
				Seksi Perlindungan Data Pribadi	<p>Terlaksananya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menerima pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi oleh PSE,</li> <li>➢ koordinasi dengan pimpinan instansi dan pengatur sektor terkait pengaduan sengketa data pribadi,</li> <li>➢ menyelesaikan sengketa data pribadi,</li> <li>➢ membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi,</li> <li>➢ Meminta data &amp; Informasi secara berkala atau sewaktu-waktu dari PSE dalam rangka perlindungan data pribadi,</li> <li>➢ melakukan edukasi kepada masyarakat (pendidikan, pelatihan, advokasi, bimtek, sosialisasi),</li> <li>➢ memberdayakan partisipasi masyarakat dalam edukasi perlindungan data pribadi</li> </ul>
		Subdirektorat Pengendalian Konten Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemutusan akses sistem elektronik</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan instansi atau pengatur sektor terkait pengaduan konten</li> </ul>	Seksi Pemblokiran Konten Internet Ilegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melakukan pemutusan akses sistem elektronik</li> <li>-Terlaksananya penindakan konten Internet negatif::</li> <li>➢ Whitlist PSE,</li> </ul>

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
			internet ilegal, ➤ Melakukan penindakan konten Internet negatif: ➤ Whitlist PSE, ➤ Blacklits PSE, ➤ trustpositiv, ➤ DNSSec. ➤ Penanganan insiden dan tanggap darurat sistem elektronik seperti CSIRT-ICT, • Pengelolaan command center, • Perawatan DNS alat pemblokiran.		➤ Blacklits PSE, ➤ trustpositiv, ➤ DNSSec. ➤ Penanganan insiden dan tanggap darurat sistem elektronik seperti CSIRT-ICT,
				Seksi Infrastruktur Pemblokiran Konten	Pengelolaan dan pengopersian sarana dan prasana pusat kendali pemblokiran internet ilegal: ➤ pengelolaan command center, ➤ Perawatan DNS alat pemblokiran.
		Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan	• Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran UU ITE, antara lain : ✓ Pemberian keterangan ahli ✓ Membuat suatu data/sistem elektronik tidak dapat diakses ✓ Koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta pihak terkait lainnya ✓ Pemanggilan saksi, ✓ Pemeriksaan saksi, ✓ Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka ✓ Pemeriksaan alat bukti baik di TKP maupun laboratorium, ✓ Penangkapan, ✓ Pembinaan PPNS ✓ Penggeledahan, ✓ Penyitaan, ✓ Pemberkasan ✓ Pengelolaan laboratorium forensik digital ✓ Penyelenggaraan Bimbingan teknik ✓ Pengoperasian Command Center untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan • Aktif Sebagai anggota/peserta forum Internasional terkait fungsi Digital Forensik dan PPNS	Seksi Penyidikan	Pemeriksaan bukti awal terkait tindak pidana, Geledah/Sita bukti terkait tindak pidana, Pemeriksaan alat bukti secara digital forensik di TKP dan Laboratorium, pengelolaan laboratorium Digital Forensik, pemberian keterangan Ahli teknis, Bimbingan Teknis penanganan bukti dan forensik digital.
				Seksi Penindakan	Penindakan terkait pelanggaran ITE : pemanggilan saksi, tersangka, koordinasi dengan penegak hukum, geledah, sita, penangkapan, pembuatan berita acara pemeriksaan, pengajuan berkas perkara ke kejaksaan, pemberian keterangan ahli hukum, bimbingan teknis UU ITE
		Subdit. Pengendalian Penyelenggara Sertifikasi	- Melaksanakan pemberian pengakuan (ijin) CA serta operational Root CA - melakukan pengawasan terhadap	Seksi Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	- Melaksanakan pemberian pengakuan (ijin) CA serta operational Root CA - melakukan pengawasan terhadap

ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
NAMA JABATAN	OUTCOME	NAMA JABATAN	OUTPUT	NAMA JABATAN	OUTPUT
		Elektronik	<p>operational CA dan Root CA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertanggungjawab pada pengembangan Root CA, termasuk memastikan terpenuhinya sertifikasi internasional (Webtrsut) tahunan,</li> <li>- Pendaftaran sertifikat digital Root CA ke browser internasional, dan kerjasama dengan Root CA Asing.</li> <li>- memberikan konsultasi penggunaan sertifikat digital yang benar pada layanan online, serta menyediakan API untuk mempermudah implementasi pada layanan online.</li> <li>- Bekerjasama dengan instansi pemerintah dan layanan swasta membuat pilot project dan Proof of Concept (PoC) pada layanan online.</li> <li>- Pengawasan penciptaan industri sertifikat digital nasional</li> <li>- Pengawasan pembangunan registration authority (RA) nasional di sector strategi implementasi Sertifikat Digital pada layanan pemerintah dan non pemerintah,</li> <li>- Pengawasan Penerapan standar dan panduan teknis CA,</li> <li>- Pengawasan pelaksanaan PNBP agar pembiayaan implementasi sertifikat digital dapat dibiayai tanpa menggunakan anggaran APBN.</li> </ul>		<p>operational CA dan Root CA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertanggungjawab pada pengembangan Root CA, termasuk memastikan terpenuhinya sertifikasi internasional (Webtrsut) tahunan,</li> <li>- memberikan konsultasi penggunaan sertifikat digital yang benar pada layanan online, serta menyediakan API untuk mempermudah implementasi pada layanan online.</li> </ul>
				Seksi Pengawasan Penyelenggara Sertifikat Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerjasama dengan instansi pemerintah dan layanan swasta membuat pilot project dan Proof of Concept (PoC) pada layanan online.</li> <li>- Pengawasan penciptaan industri sertifikat digital nasional</li> <li>- Pengawasan pembangunan registration authority (RA) nasional di sector strategi implementasi Sertifikat Digital pada layanan pemerintah dan non pemerintah,</li> <li>- Pengawasan Penerapan standar dan panduan teknis CA,</li> <li>- Pengawasan pelaksanaan PNBP agar pembiayaan implementasi sertifikat digital dapat dibiayai tanpa menggunakan anggaran APBN.</li> </ul>